

**Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***
(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)

Rahida Ayatunisa

Ndahrahida22@student.ub.ac.id

Dr.Dra. Arum Prastiwi , M.Si.,Ak.

arum@ub.ac.id

Accounting Department, Faculty of Economics and Business Brawijaya University
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 data observasi yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan publik yang diterbitkan di BEI. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan frekuensi rapat dewan komisaris dapat meningkatkan pengungkapan CSR.

Kata Kunci: Kepemilikan Publik, Kepemilikan Institusional, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, *Corporate Social Responsibility*

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of Public Ownership, Institutional Ownership, Board of Commissioners Meeting Frequency on the disclosure of corporate social responsibility of Textile and Garment Sub Sector Companies Listed on the Indonesia

Stock Exchange in 2018-2019. This research employs quantitative approach, involving 36 observed data selected through purposive sampling method. The data are collected from the documentations of the financial statements of the public companies published on the IDX, and are analyzed by multiple linear regression utilizing SPSS software version 24. The research reveals that public ownership do not affect the corporate social responsibility disclosure, while institutional ownership and board of commissioners meeting frequency positively affect the corporate social responsibility disclosure. It implies that institutional ownership and board of commissioners meeting frequency can increase corporate social responsibility disclosure.

Keywords: Public Ownership, Institutional Ownership, Board of Commissioners Meeting Frequency, Corporate Social Responsibility Disclosure

PENDAHULUAN

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu kontribusi terhadap pengembangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kini, tanggung jawab sosial perusahaan perlu berlandaskan pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi apabila perusahaan menginginkan suatu keberlanjutan. Pengungkapan tanggung jawab sosial serta lingkungan telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1). Apabila tidak melakukan pengungkapan akan dikenai sanksi seperti yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 3, PP No. 47 Tahun 2012 pasal 7, dan UU No. 25 Tahun 2007 pasal 34. Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia tercermin dari masih banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti penyimpangan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh industri tekstil dan garmen.

Terdapat sejumlah faktor terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Kepemilikan publik ialah jumlah saham yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat di dalam suatu perusahaan. Menurut Badjuri (2012) yang dikutip oleh Oktariani (2012) menyatakan perusahaan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat yang ditandai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh publik

dan dianggap mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat lebih luas untuk mengungkapkan informasi sosialnya.

Faktor lain yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal dan cenderung berinvestasi untuk jangka panjang. Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) yang dikutip oleh Nugrahanti dan Novia (2012) menyatakan kepemilikan institusional yaitu besarnya kepemilikan saham perusahaan dari pemodal institusional misalnya perusahaan asuransi, bank, pemerintah, perusahaan investasi, ataupun kepemilikan perusahaan dan lembaga lain. Kepemilikan institusional yang besar dapat menambah kendali atas perusahaan, maka besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh institusi dapat menjadi sebuah alasan pengungkapan oleh perusahaan (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

Selain kepemilikan publik dan institusional, dewan komisaris yang diproksikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris juga termasuk faktor yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris berfungsi sebagai evaluasi keputusan dari dewan direksi serta penerapannya (Charles dan Chariri, 2012). Frekuensi rapat yang sering dilakukan oleh dewan komisaris cenderung mengatur kegiatan atau aktifitas perusahaan dan berusaha mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial agar terpenuhinya berbagai keinginan pemangku kepentingan (Sektiyani dan Ghozali, 2019).

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019).”**

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori stakeholder

Teori *stakeholder* dikenalkan tahun 1980 oleh Freeman (1984), menurut Freeman dan Reed (1983) yang dikutip oleh Solikhah dan Kuswoyo (2019) menyatakan dalam memenuhi tercapainya suatu tujuan organisasi dipengaruhi oleh adanya keterkaitan antara perusahaan dan seluruh kebijakan perusahaan dengan *stakeholder*. Menurut Herman (2018), bahwa perusahaan tidak dapat berjalan atau hidup tanpa adanya *stakeholders* primer, yang termasuk dalam *stakeholders* primer yaitu karyawan, pemilik perusahaan, pemasok serta pelanggan. Sedangkan *stakeholders* sekunder merupakan pihak yang dapat mempengaruhi perusahaan atau dipengaruhi, yang termasuk ke dalam *stakeholders* sekunder yaitu pemerintah, aktivis, masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Dalam teori ini, perusahaan dalam memenuhi keinginan dari macam-macam pemangku kepentingan perusahaan harus dapat menyesuaikan strategi. Dalam penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial ini, pengungkapan tersebut merupakan sebuah strategi perusahaan dalam mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Perusahaan sangat membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*, dikarenakan dukungan yang didapatkan dari para pemangku kepentingan dapat berpengaruh pada eksistensi perusahaan. Informasi-informasi terkait dengan operasional perusahaan, pengaruh yang diberikan dari aktivitas operasional perusahaan dan apa yang sudah dilaksanakan perusahaan untuk menanggulangi pengaruh yang dimunculkan akan berusaha diungkapkan oleh perusahaan untuk memuaskan keinginan para *stakeholder*.

Teori keagenan

Teori keagenan berkaitan dengan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) menurut Jensen dan Meckling (1976). Hubungan ini cenderung memunculkan suatu perbedaan kepentingan, karena pada prinsipnya manusia akan berusaha memaksimalkan manfaat bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam

implementasi pengungkapan CSR dimungkinkan juga munculnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Teori agensi juga merupakan salah satu teori utama yang berkaitan dengan *corporate governance* (Munir, Suyandari, dan Mahmudah, 2014). Tata kelola perusahaan yang baik diartikan sebagai sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan yang akan menghasilkan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (Munir, Suyandari, dan Mahmudah, 2014). Mekanisme tata kelola perusahaan tidak terbatas hanya pada jumlah dan komposisi dewan, tetapi juga pada penggunaan ukuran proses kerja dewan yaitu ukuran jumlah rapat yang dilakukan. Jumlah rapat anggota dewan komisaris dalam setahun digunakan sebagai salah satu indikator tata kelola perusahaan dan juga mencerminkan efektivitas dewan dan tingkat pengendalian pada kegiatan yang disampaikan (Naseem *et.al*, 2017). Dari segi teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu untuk menyamakan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Hadiprajitno, 2013). Berdasarkan proses kerjanya, semakin sering rapat dilakukan maka kualitas pengendalian dan pembinaan manajemen akan lebih baik, dan pada akhirnya biaya keagenan/konflik kepentingan dapat diturunkan (Hadiprajitno, 2013). Dewan dengan jumlah rapat yang sering cenderung menangani operasi bisnis perusahaan dan mengungkapkan informasi CSR untuk memenuhi berbagai pemangku kepentingan (Sektiyani dan Ghozali, 2019). Dewan komisaris ditunjuk prinsipal untuk menghindari masalah keagenan terkait adanya konflik kepentingan terkait pelaksanaan CSR antara pemilik dan agen serta menurunkan biaya agensi, memperkuat sistem pengendalian internal, mengawasi manajer, memaksimalkan kinerja manajer dan juga meningkatkan kualitas pengungkapan *corporate social responsibility* (Jensen dan Meckling, 1976) yang dikutip oleh (Sektiyani dan Ghozali, 2019).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Wibisono (2007) yang dikutip oleh Sahla dan Aliyah (2016) memaparkan tanggung jawab sosial perusahaan ialah sebuah komitmen berkesinambungan perusahaan untuk

mengambil tindakan etis serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi, masyarakat luas ataupun lingkungan setempat, bersamaan dengan meningkatkan tingkat hidup karyawan.

Global Reporting Initiative

GRI merupakan organisasi internasional independen yang menjadi pelopor standar pelaporan keberlanjutan yang memiliki tujuan untuk membantu bisnis dan organisasi dapat memegang tanggung jawab terhadap pengaruh yang diberikan pada ekonomi, lingkungan, maupun masyarakat. Pedoman yang dipakai penelitian ini adalah GRI *standards* yg merupakan pedoman GRI terbaru.

Kepemilikan Publik

Rivandi (2020) menyatakan kepemilikan publik yaitu yang mana semua kegiatan dan kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan oleh pihak publik yang merupakan salah satu pihak stakeholder.

Kepemilikan Institusional

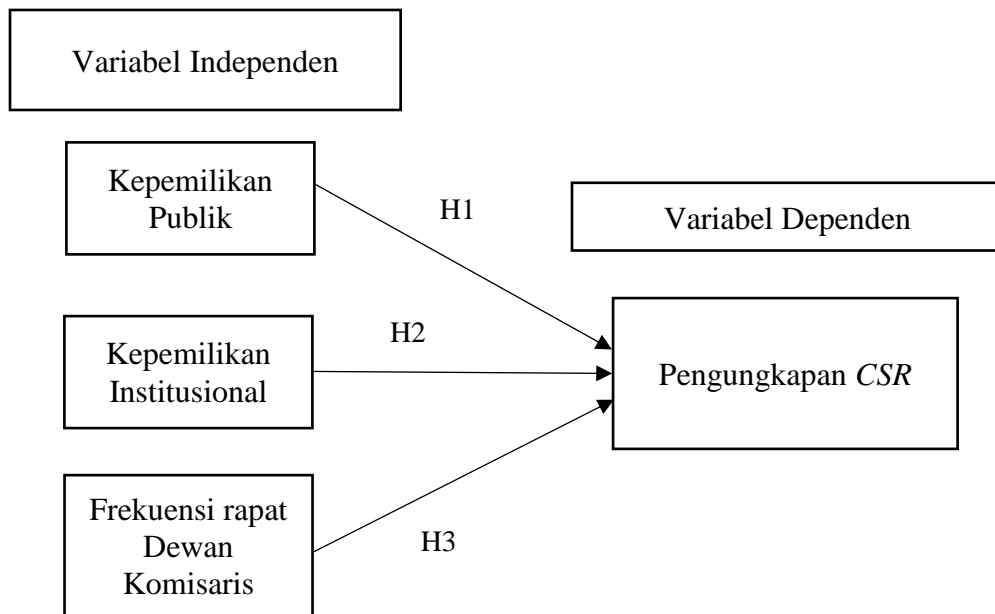
Kepemilikan institusional ialah pemegang saham paling besar, maka memiliki power dalam mengawasi manajemen menurut Djakman dan Machmud (2008) yang dikutip oleh Marietza dan Alfredo (2017).

Dewan komisaris

Pada peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris yaitu organ emiten yang bertugas mengawasi secara khusus maupun umum berdasarkan anggaran dasar juga menasihati direksi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris diwajibkan melakukan rapat setidaknya dilakukan satu kali dalam dua bulan. Rapat yang dilakukan berfungsi sebagai implementasi tugas pengawasan untuk menghindari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dilaksanakan dewan komisaris serta berguna sebagai evaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dalam menilai kualitas

dan kinerja dewan perlu lebih memperhatikan pada proses kerja (jumlah rapat yang dilakukan) dibanding hanya pada jumlah anggotanya menurut Kaen (2003), Shaw (2003), Knell (2006), dan Nadler dkk (2006) yang dikutip oleh Hadiprajitno (2013).

Model Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Publik Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Teori *stakeholder* yang menerangkan jika para pemangku kepentingan merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan maupun aktivitas perusahaan bisa dipengaruhi olehnya. *Stakeholder* yang dimaksud pada penelitian ini yaitu investor publik. Kepemilikan saham publik merupakan kepemilikan yang terbagi-bagi dan tersebar pada berbagai individu sehingga lebih banyak pihak yang mengawasi aktivitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan publik, artinya semakin banyak pihak yang perlu akan informasi perusahaan. Sehingga, dengan kepemilikan saham publik akan

memicu perusahaan agar lebih luas mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya. Dalam hasil penelitian oleh Kusuma (2016) serta Rindiyawati dan Arifin (2019) memaparkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Maka, peneliti membuat hipotesis di bawah ini :

H₁ : Kepemilikan Publik Memberi Pengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan teori *stakeholder* menerangkan bahwa *stakeholder* sebagai pihak yang mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bisa memberi pengaruh pada kegiatan perusahaan. Tingginya taraf kepemilikan institusional akan menyebabkan upaya memonitoring yang lebih tinggi oleh pihak pemodal institusional dan akan mempengaruhi pada kebijakan manajemen yang akan diambil. Salah satu kebijakannya ialah dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Sari, Sutrisno, Sukoharsono (2013) serta Nurrahman dan Sudarno (2013) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Maka, peneliti membuat hipotesis di bawah ini :

H₂ : Kepemilikan Institusional Memberi Pengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama

untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyalurkan kepentingan pemegang saham dan manajer (Hadiprajitno, 2013). Dewan komisaris ditunjuk untuk menghindari masalah keagenan seperti adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan CSR. Mekanisme tata kelola perusahaan tidak terbatas pada jumlah dan komposisi dewan, tetapi juga pada penggunaan banyaknya proses kerja dewan yaitu ukuran jumlah rapat yang dilakukan. Frekuensi rapat yang sering diadakan oleh dewan komisaris cenderung mengatur kegiatan atau aktifitas perusahaan dan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial agar terpenuhinya berbagai keinginan pemangku kepentingan (Sektayani dan Ghozali, 2019). Hasil penelitian oleh Solikhah dan Kuswoyo (2019) serta Sektayani dan Ghozali (2019) menunjukkan frekuensi rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Maka, peneliti membuat hipotesis di bawah ini :

H₃ : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Memberi Pengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2018-2019. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Tersedianya laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama periode 2018-2019.
2. Perusahaan tekstil dan garmen yang tidak mengalami delisting dari BEI sepanjang tahun 2018-2019.

3. Perusahaan dengan ketersediaan data dan kelengkapan informasi dalam laporan tahunan terkait dengan variabel dalam penelitian selama tahun 2018-2019.

Data Penelitian dan Sumbernya

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari website perusahaan atau website resmi Bursa Efek Indonesia. Jenis data pada penelitian ini yakni data dokumenter, yaitu data pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2018-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang diperlukan.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan jumlah kepemilikan saham yang masyarakat miliki atas saham perusahaan (Rindiyawati dan Arifin, 2019). Variabel kepemilikan publik bisa dihitung dengan perbandingan total kepemilikan saham oleh publik dengan jumlah lembar saham yang diedarkan (Kusuma, 2016) :

$$KP = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham oleh Publik}}{\text{Total Lembar Saham yang Beredar}}$$

Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham yang pihak institusi miliki. Apabila dalam perusahaan memiliki lebih dari satu kepemilikan oleh institusi yang mempunyai saham pada perusahaan, maka kepemilikan ini diukur dengan proksi jumlah kepemilikan oleh investor institusi terhadap total lembar saham yang beredar (Sari, Sutrisno, dan Sukoharsono, 2013) :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham oleh Institusi}}{\text{Total Lembar Saham yang Beredar}}$$

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris yaitu pihak yang mempunyai wewenang dalam pengawasan pada aktivitas manajemen di dalam suatu perusahaan dan memberikan nasehat kepada direksi. Pengukuran frekuensi rapat dewan komisaris dengan mengetahui jumlah rapat yang dilaksanakan anggota dewan komisaris selama setahun yang dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan (Charles dan Chariri, 2012) :

$$FRDK = \Sigma \text{Rapat Dewan Komisaris}$$

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility bisa dihitung dengan indeks CSR (CSRI). Perhitungan ini dilakukan melalui perbandingan item yang telah diungkap perusahaan dengan seluruh item yang harusnya diungkap yang telah tertera pada *GRI standard*, *GRI standard* dipakai karena merupakan pedoman GRI terbaru yang dijadikan acuan dalam melaporkan CSR. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor 1 pada butir yang diungkapkan dan butir yang tidak diungkapkan nilainya 0.

Berikut rumus dari pengungkapan CSR (Sari, Sutrisno dan Sukoharsono, 2013)

yaitu :

$$\text{Tingkat pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan item CSR yang Harus Diungkapkan}}$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

α : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien Regresi

X_1 : Kepemilikan Publik

X_2 : Kepemilikan Institusional

X_3 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

ε : *Standard Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2018-2019. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dengan beberapa kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan peneliti sebagai berikut :

Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
1. Perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat pada BEI tahun 2018-2019	19
2. Perusahaan garmen dan tekstil yang mengalami <i>delisting</i> selama periode pengamatan 2018-2019	(0)
3. Perusahaan garmen dan tekstil yang tidak melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan selama tahun 2018-2019	(0)
4. Perusahaan garmen dan tekstil yang tidak memiliki kelengkapan informasi terkait variabel penelitian selama tahun 2018-2019	(1)
Jumlah sampel	18
Data observasi (2 tahun)	36

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Persamaan Regresi

Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,029	0,033		0,891	0,380
X1	0,060	0,044	0,220	1,359	0,184
X2	0,147	0,036	0,649	4,091	0,000
X3	0,004	0,002	0,284	2,059	0,048

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan persamaan regresi :

$$Y = 0,029 + 0,060 X_1 + 0,147 X_2 + 0,004X_3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,647 ^a	,419	,364	,0459933

Berdasarkan analisis pada tabel diatas didapat hasil adjusted R square senilai 0,364. Berarti bahwa 36,4% variabel pengungkapan CSR bisa diterangkan oleh variabel independennya, yaitu variabel Kepemilikan Publik (X1), Kepemilikan Instiusional (X2), dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (X3). Sedangkan sisanya 63,6% variabel pengungkapan CSR dapat diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada

penelitian ini.

Uji F

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,049	3	,016	7,678	,001 ^b
	Residual	,068	32	,002		
	Total	,116	35			

Data dari hasil uji F pada penelitian ini berdasarkan yang bisa diamati pada tabel diatas membuktikan bahwa angka signifikan uji F yaitu $0,001 < 0,05$. $F_{hitung} = 7,678 > F_{tabel} = 2,89$. Hal demikian artinya bahwa variabel independen model regresi secara bersamaan memberi pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t

Hasil Uji t

1. Hasil signifikansi variabel kepemilikan publik dengan pengungkapan CSR menunjukkan angka signifikan senilai 0,184. Angka signifikansi X_1 melebihi $\alpha = 0,05$ dengan koefisien b_1 senilai 0,060, maka variabel kepemilikan publik tidak memberi pengaruh atau tidak dapat menjelaskan variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau H_0 diterima/ H_a ditolak.
2. Hasil signifikansi kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR menunjukkan angka signifikan senilai 0,000. Angka signifikansi X_2 kurang dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien b_2 senilai 0,147, berarti Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan naik senilai 0,147 satuan untuk tiap penambahan satu satuan kepemilikan institusional, maka jika kepemilikan

institusional semakin tinggi maka Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan naik senilai 0,147 satuan yang mana variabel yang lain dikatakan konstan atau H_0 ditolak/ H_a diterima.

3. Hasil signifikansi frekuensi rapat dewan komisaris dengan pengungkapan CSR membuktikan skor signifikansi senilai 0,048. Angka signifikansi X^2 di bawah $\alpha = 0,05$ dan koefisien b_3 senilai 0,004, berarti Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan naik senilai 0,004 satuan untuk tiap penambahan satu satuan frekuensi rapat dewan komisaris, jadi apabila semakin tingginya frekuensi rapat dewan komisaris, maka Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan naik senilai 0,004 satuan dengan perkiraan variabel yang lain dikatakan konstan atau H_0 ditolak/ H_a diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan CSR

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, variabel kepemilikan publik tidak memberi pengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini tidak memperkuat penelitian Kusuma (2016) serta Rindiyawati dan Arifin (2019) yang membuktikan hasil kepemilikan publik memiliki pengaruh positif. Hasil ini memperkuat penelitian Pasaribu, Kowanda, dan Kurniawan (2015), serta Yawenas, Tan, dan Sutanto (2013) yang menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan besaran proporsi kepemilikan oleh publik pada perusahaan tekstil dan garmen tidak memberi pengaruh luas pengungkapan CSR oleh perusahaan. Rata-rata saham yang dimiliki oleh publik pada perusahaan tekstil dan garmen relatif kecil yaitu sebesar 25% dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan, kepemilikan saham dengan skala kecil yang mana para pemegang saham publik diduga kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tidak mendorong perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR. Kepemilikan saham publik yang relatif kecil tersebar ke berbagai investor, sehingga kepemilikan dari tiap-tiap masyarakat menjadi sangat lemah agar dapat mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan termasuk mempengaruhi

pengungkapan informasi (Yawenas, Tan, dan Sutanto, 2013).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Pada hasil analisis mempergunakan metode regresi berganda, variabel kepemilikan institusional memberi pengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil ini membuktikan bahwa kenaikan nilai pengungkapan CSR pada perusahaan sama dengan kenaikan nilai kepemilikan institusional. Hasil ini tidak memperkuat penelitian oleh Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), serta Saputra (2019) yang memaparkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Hasil ini mendukung dan selaras dengan penelitian terdahulu oleh Sari, Sutrisno, dan Sukoharsono (2013) serta Nurrahman dan Sudarno (2013) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CSR. Hal demikian menerangkan bahwa perusahaan yang mempunyai saham oleh institusi yang lebih besar akan memberi dukungan pada perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Sesuai dengan teori stakeholder, bahwa pemegang saham adalah pihak yang mempunyai kepentingan atas perusahaan yang bisa memberi pengaruh pada kegiatan perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional akan amat berdampak dan berpengaruh pada keputusan manajemen yang akan dipilih, karena investor institusional memiliki power yang kuat atas mayoritas saham yang dimiliki serta dapat menyewa ahli untuk membantu dalam pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar bisa menambah kendali pemodal atas perusahaan, maka besarnya kepemilikan saham yang dimiliki lembaga dalam suatu perusahaan bisa menjadi sebuah alasan pengungkapan oleh perusahaan (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, variabel frekuensi rapat dewan komisaris secara positif memberi pengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini memaparkan bahwa peningkatan nilai frekuensi rapat dewan komisaris akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai pengungkapan CSR pada perusahaan. Hasil

ini tidak mendukung penelitian Suhardjanto, Utama dan Supriyono (2013) serta Haribowo (2015) yang membuktikan hasil jumlah rapat dewan komisaris tidak memberi pengaruh. Hasil ini mendukung dan selaras dengan penelitian sebelumnya dari Solikhah dan Kuswoyo (2019), serta Sektiyani dan Ghozali (2019) yang mengungkapkan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris dalam melaksanakan rapat dimungkinkan juga memperhatikan mengenai pengungkapan CSR ataupun praktik CSR oleh perusahaan dimana rapat dewan komisaris merupakan mekanisme terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan teori agensi, dewan komisaris ditunjuk prinsipal untuk menghindari masalah keagenan terkait adanya konflik kepentingan terkait pelaksanaan CSR antara pemilik dan agen serta untuk menurunkan biaya agensi, memperkuat sistem pengendalian internal, mengawasi manajer, memaksimalkan kinerja manajer dan juga meningkatkan kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Jensen dan Meckling, 1976) yang dikutip oleh (Sektiyani dan Ghozali, 2019). Berdasarkan proses kerjanya, semakin sering rapat dilakukan maka kualitas pengendalian dan pembinaan manajemen akan lebih baik, dan pada akhirnya biaya keagenan/konflik kepentingan dapat diturunkan (Hadiprajitno, 2013). Dewan dengan jumlah rapat yang sering atau banyak cenderung menangani operasi bisnis perusahaan dan mengungkapkan informasi CSR untuk memenuhi berbagai pemangku kepentingan (Sektiyani dan Ghozali, 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian diadakan pada delapan belas perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat pada BEI selama 2018-2019. Secara uji parameter individual, memperlihatkan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris memberi

dampak positif pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel kepemilikan institusional memberi pengaruh positif pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada industri tekstil dan garmen. Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh variabel kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dikarenakan rerata saham yang dimiliki oleh publik yang relatif kecil hanya sebesar 25% pada industri tekstil dan garmen, oleh karena kepemilikan gabungan yang dimiliki masyarakat relatif kecil maka kekuatan yang dimiliki agar dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang ada di dalam perusahaan menjadi lemah.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat sejumlah keterbatasan pada penelitian ini, yakni :

1. Variabel yang di uji dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan 36,4% dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang membuktikan bahwa masih terdapat sekitar 63,6% variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran

Terdapat sejumlah saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti yang hendak mengadakan penelitian berikutnya dan pihak lainnya. Beberapa saran yang disampaikan yaitu :

1. Harapannya untuk manajemen perusahaan agar lebih rinci dan terbuka dalam menjelaskan pengungkapan aktivitas yang dilaksanakan perusahaan berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa disampaikan pada laporan secara terpisah ataupun pada laporan keberlanjutan.
2. Harapannya, penelitian berikutnya bisa menambah variabel independen lainnya seperti struktur kepemilikan lainnya yaitu kepemilikan asing dan kepemilikan

manajerial yang tidak ada pada penelitian ini yang bisa memberi dampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, S. (2018). Program optimization and Corporate Social Responsibility activities in Bontang City. *Dialektika, XIII*.
- Chapagain, B. R. (2021). The effects of internal, external and aggregated CSR practices on the firm's reputation and profitability. *Rajagiri Management Journal*.
- Charles, & Chariri. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Chen, T., Dong, H., & Lin, C. (2019). Institutional shareholders and corporate social responsibility. *Journal of financial economics*.
- Darus, F., Mad, S., & Yusoff, H. (2014). The importance of ownership monitoring and firm resources on corporate social responsibility (CSR) of financial institutions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.
- Dyck, A., Lins, K. V., Roth, L., & Wagner, H. F. (2019). Do institutional investors drive corporate social responsibility? International evidence. *Journal of Financial Economics, 693-714*.
- Edison, A. (2017). Struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pengaruhnya terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Bisnis dan Manajemen, XI, 164-175*.
- Faizal, P. R., & Probohudono, N. A. (2013). Determinan voluntary nonfinancial disclosure pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, XVII*.
- Fajrina, R. (2014). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan Solvabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, 1-26*.
- Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan biaya keagenan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.

- Handayati, P. (2017). Analisis kinerja lingkungan dan mekanisme GCG terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 58-68.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haribowo, I. (2015). Analisis pengaruh islamic corporate governance terhadap corporate social responsibility. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Herman. (2018). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh *Stakeholder* Primer dan Sekunder. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, II*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency costs and Ownership Structure. *Journal of financial economics* , 305-360.
- Krisna, A. D., & Suhardianto, N. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, XVIII*, 119-128.
- Kusuma, H. N. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, V*.
- Marietza, F., & Alfredo, D. Y. (2017). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kepemilikan institusional. *Jurnal Akuntansi, VII*.
- Maulud, M. I. (2019, Oktober 3). *Industri tekstil akan hancur jika pencemaran Citarum tak ditangani baik*. Diambil kembali dari PikiranRakyatcom.
- Maulud, M. I. (2019, Oktober 3). *Industri Tekstil Akan Hancur Jika Pencemaran Citarum Tak Ditangani Baik*. Diambil kembali dari PikiranRakyatCom: <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01320414/industri-tekstil-akan-hancur-jika-pencemaran-citarum-tak-ditangani-baik>
- Muazimah, A. (2020). Pengaruh fast fashion terhadap budaya konsumerisme dan kerusakan lingkungan di Indonesia. *JOM FISIP* .
- Munir, M., Suryandari, E. S., & Mahmudah, A. (2014). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan implementasi CSR sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

- Naseem, M. A., Riaz, S., Rehman, R. U., Ikram, A., & Malik, F. (2017). Impact of board characteristics on corporate social responsibility disclosure. *The journal of applied business research*.
- Nugraha, I. (2018, Januari 23). *Kompas.Com*. Diambil kembali dari regional.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/12441541/cemari-sungai-citarum-pabrik-tekstil-pt-south-pacific-viscose-didemo-warga>
- Nugrahanti, Y. W., & Novia, S. (2012). Pengaruh struktur kepemilikan sebagai mekanisme corporate governance terhadap kinerja perbankan. *Jurnal Manajemen*, 151-170.
- Nurrahman, A., & Sudarno. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-14.
- Oktariani, W. (2013). Pengaruh kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*.
- Pasaribu, R. B., Kowanda, D., & Kurniawan, D. (2015). Pengaruh earning management dan mekanisme Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 97-121.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduak Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Purwanto, A., & Laksmitaningrum, C. F. (2013). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan, ukuran dewan komisaris dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Raditia. (2020, September 12). *GatraCom*. Diambil kembali dari gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/490135/kesehatan/cemari-sungai-pt-sma-ditegur-jika-bandel-izin-usaha-dicabut>
- Rakhman, I., & Laksito, H. (2017). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepemilikan institusional. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1-14.
- Rindiyawati, A., & Arifin, J. (2019). Determinan pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1-12.

- Rivandi, M. (2021). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 21-40.
- Sahla, W. A., & Aliyah, S. S. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI-G4) pada Perbankan Indonesia. *Jurnal INTEKNA*, XVI.
- Saputra, S. E. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik, pertumbuhan perusahaan dan tipe industri terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan high profile di Bursa Efek Indonesia. *Journal of RESIDU*.
- Sari, A. R., Sutrisno, & Sukoharsono, E. G. (2013). Pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, kinerja perusahaan terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility di dalam Sustainability Report pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, II.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. USA: Salemba Empat.
- Sektiyani, W., & Ghozali, I. (2019). Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Pengungkapan CSR. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Septian, D. (2020, Februari 27). *Liputan 6*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4188738/terbukti-cemari-das-citarum-perusahaan-ini-kena-denda-rp-12-miliar>
- Singal, P. A., & Putra, I. N. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 468-484.
- Solikhah, B., & Kuswoyo, A. (2019). Kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan LQ-45 dan Faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Suhardjanto, D., Utama, W. B., & Supriyono. (2013). Peran Corporate Governance Dalam Pengungkapan Sosial dan Lingkungan : Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 93-113.
- Susanti, R. (2017, Maret 14). *Kompas.Com*. Diambil kembali dari regional.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/14/10050091/kasus.limbah.rancaek.ek.masuk.ke.mahkamah.agung?page=all>

- Tang, P., Yang, S., & Yang, S. (2020). How to design corporate governance structures to enhance corporate social responsibility in China's mining state-owned enterprises? *Resources Policy*.
- Widiasworo, E. (2019). *Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Araska.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Yang, C. C., Lai, P. L., & Zhu, X. (2021). Can corporate social responsibility enhance organizational image and commitment in the ocean freight forwarding industry? *Maritime Business Review*.
- Yawenas, V. E., Tan, Y., & Sutanto, A. C. (2013). Studi hubungan antara mekanisme corporate governance dengan pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Zulhaimi, H., & Nuraprianti, N. R. (2019). Pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, VII*.